



# PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2023



**MAINI ASNA, SKM, M.Si**  
Kepala Dinas PPPA Dumai



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA DUMAI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

 <https://dpppa.dumaikota.go.id>

 Jalan Putri Tujuh Komplek Rumah Dinas Pemerintah Kota Dumai



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Putri Tujuh Komplek Rumah Dinas Kota Dumai

Telp. (0765) 438880 Fax (0765) 438080

DUMAI

**KEPUTUSAN  
WALI KOTA DUMAI  
NOMOR : 09 /SK/DPPA/2023**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2023  
WALI KOTA DUMAI**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab diperlukan peningkatan budaya kerja dan etos kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas;
- b. Bahwa untuk lebih memantapkan pelaksanaan penyusunan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan serta mewujudkan Good Governance perlu disusun dan disampaikan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali kota Dumai tentang Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4432);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pelaporan Keuangan dan Kinerja dan Instansi Pemerintah Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;
10. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kota Dumai;

11. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai;
12. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai ( Berita Daerah Kota Dumai tahun 2016 Nomor 23 Seri D );
13. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai tahun 2023;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2023;

#### Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 adalah Perubahan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada Tahun 2023.

#### Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 merupakan Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sesuai tugas, pokok dan fungsi, menjamin komitmen dan konsistensi perencanaan dan program serta kegiatan sebagai landasan dalam penentuan program dan kegiatan tahunan serta acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

#### Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : D U M A I

Pada tanggal : 10 Agustus 2023

---

A.n. WALIKOTA DUMAI  
KEPALA,



PEMERINTAH KOTA  
DUMAI  
DINAS PERBUDAYAAN DAN KEMASYARAKATAN  
JALAN PETA BUKITINGGAL

**MAINI ASNA, SKM, M. Si**  
NIP. 19680529 198903 2 002

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2023 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021-2026. Kedua dokumen acuan tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang diarahkan untuk mewujudkan *Visi Kota Dumai “Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”*.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan Rencana Kerja dan kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai melalui target rencana kerja dan pencapaian kinerja ini untuk lebih meningkatkan kinerja serta kerja sama semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

Akhirnya tidak lupa diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Dumai, 10 Agustus 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Dumai,



**MAINI ASNA, SKM, M.Si**  
NIP.19680529 198903 2 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>	<b>6</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.....	20
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	31
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	38
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN         PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI .....</b>	<b>43</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Dumai.....	44
3.3 Program dan Kegiatan.....	45
<b>BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS         PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK         KOTA DUMAI.....</b>	<b>50</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian .....	67
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut .....	67
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	68

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II (Periode Juni 2023) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai .....	11
Tabel 2.2.1.1	Proporsi Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 .....	22
Tabel 2.2.1.2	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 .....	22
Tabel 2.2.1.3	Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 .....	23
Tabel 2.2.1.4	Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jabatan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 .....	24
Tabel 2.2.1.5	Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jabatan Struktural Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 .....	25
Tabel 2.2.1.6	Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Pangkat dan Golongan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 .....	25
Tabel 2.2.2.1	Tabel Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta Target dan Realisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 .....	26
Tabel 2.2.2.2	Tabel Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 .....	26
Tabel 2.4	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaah Visi, Misi, dan Program pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 .....	39
Tabel 4.1	Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai .....	51



## DAFTAR GRAFIK

Grafik A.1	Jumlah Korban Kekerasan yang Datang ke UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.....	28
Grafik A.2	Jumlah Kekerasan Perempuan Berdasarkan Jenis Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.....	29
Grafik A.3	Jumlah Kekerasan Anak Berdasarkan Jenis Kelamin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.....	29
Grafik A.4	Jumlah Kekerasan Anak Berdasarkan Jenis Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.....	30

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, hal ini untuk menjamin kesesuaian program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam rangka penyusunan perubahan rencana kerja, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Proses penyusunan perubahan rencana kerja meliputi : (1) Persiapan Penyusunan Rencana Kerja; (2) Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja; (3) Penyusunan Rancangan Rencana Kerja; (4) Pelaksanaan Forum/ Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja; (6) Penetapan Rencana Kerja.

Rencana Kerja memiliki keterkaitan dengan perencanaan baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan tentang :

1. Pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD.
2. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
4. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Adapun yang menjadi Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya daerah Tingkat II Dumai;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;
10. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kota Dumai;
11. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai;
12. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai;
13. Peraturan Wali kota Dumai Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kota Dumai Tahun 2023;

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2023 dan perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 adalah :

1. Menyediakan data capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada tahun 2021.
2. Menyediakan dokumen perubahan rumusan rencana program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam bentuk dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan Tahun 2023.
3. Sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023, sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

	2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
	3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN**  
**TRIWULAN II TAHUN 2023**

**2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu disesuaikan antara target yang telah ditetapkan dengan Realisasi yang telah dicapai. Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu diharapkan dapat menjadi perbandingan untuk Rencana Kerja Tahun berjalan. Pada tahun 2023 total pagu anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sebesar Rp. 6,845,750,794,-, dan sampai dengan triwulan II tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 3,436,321,281,- atau 50.20% seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL 2.1**  
**PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN NON URUSAN DAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI PERIODE SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

No	Program/Kegiatan	Keuangan		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
<b>A.</b>	<b>NON URUSAN</b>	<b>5,829,508,034</b>	<b>3,171,771,878</b>	<b>54.41</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5,829,508,034</b>	<b>3,171,771,878</b>	<b>54.41</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32,222,000	6,217,800	19.30
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,371,816,496	2,325,513,095	53.19
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	238,594,357	138,284,150	57.96
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	448,532,581	287,596,000	64.12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	619,201,600	354,525,833	57.26
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119,141,000	59,635,000	50.05
<b>B.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>1,016,242,760</b>	<b>264,549,403</b>	<b>26.03%</b>

<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>263,253,700</b>	<b>51,086,000</b>	<b>19.41</b>
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	85,991,100	37,139,000	43.19
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	97,262,600	4,302,000	4.42
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	80,000,000	9,645,000	12.06
<b>2</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>185,546,000</b>	<b>33,062,900</b>	<b>17.82</b>
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	67,908,000	-	0.00
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	92,638,000	11,998,300	12.95
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25,000,000	21,064,600	84.26
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>5,999,300</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5,999,300	-	0.00
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>24,999,980</b>	<b>14,641,900</b>	<b>58.57</b>
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24,999,980	14,641,900	58.57
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>68,990,200</b>	<b>28,645,600</b>	<b>41.52</b>
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	6,449,700	-	0.00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	62,540,500	28,645,600	45.80
<b>6</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>467,453,580</b>	<b>137,113,003</b>	<b>29.33</b>
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	81,592,000	-	0.00
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	284,201,580	75,433,100	26.54
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101,660,000	61,679,903	60.67
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>6,845,750,794</b>	<b>3,436,321,281</b>	<b>50.20%</b>

*Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023*



Berikut ini merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 :

- a. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, yaitu : Program urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang terdiri dari :
  - Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sebesar 19.41%
  - Program perlindungan perempuan sebesar 17.82%
  - Program peningkatan kualitas keluarga sebesar 0.00%
  - Program pemenuhan hak anak (PHA) sebesar 41.52%
  - Program perlindungan khusus anak 29.33%
- b. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, antara lain :
  - Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
  - Program pengelolaan sistem data gender dan anak
- c. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
  - Tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran dari yang direncanakan
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :
  1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan :
    - Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sebesar 19.41% disebabkan karena :
      - Pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan tersebut dijadwalkan pada Triwulan IV menyesuaikan dengan acara di provinsi dan penyelenggaraan HUT kelembagaan yang bertepatan pada akhir tahun.

- Program perlindungan perempuan sebesar 17.82% disebabkan karena :
  - Dana diprioritaskan untuk manajemen kasus terlebih dahulu
  - Anggaran yang telah terealisasi pada Triwulan II sesuai dengan jumlah kasus yang ada
- Program peningkatan kualitas keluarga sebesar 0.00% disebabkan karena:
  - Adanya salah satu belanja ATK yang diawal penginputan salah kode belanja yang mesti diubah di APBD Perubahan dari belanja modal ke belanja barang pakai habis yang merupakan salah satu kegiatan terkait
- Program pemenuhan hak anak (PHA) sebesar 41.52% disebabkan karena :
  - Adanya beberapa sub kegiatan yang dialihkan ke APBD Perubahan
  - Kegiatan sudah dilaksanakan pada semester satu namun realisasi keuangan belum terakomodir disebabkan PPTK (Kabid) diklat PIM III
- Program perlindungan khusus anak 29.33% disebabkan karena :
  - Anggaran yang telah terealisasi pada Triwulan II sesuai dengan jumlah kasus yang ada

2. Faktor penyebab terpenuhinya atau melebihinya target kinerja program / kegiatan :

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebesar 54.41 % disebabkan oleh factor :
  - Karena sudah terlaksananya kegiatan-kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan aliran kas yang sudah direncanakan

- Program pengelolaan sistem data gender dan anak sebesar 58.57% disebabkan oleh :
    - Telah terbentuknya forum satu data sehingga memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah dalam program pengelolaan sistem data gender dan anak
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah
- Meningkatnya kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia aparatur, pendamping dan manajer kasus
  - Bertambahnya sarana pendukung kelancaran tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai
  - Meningkatnya partisipasi perempuan dibidang politik dan jabatan publik serta meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan perempuan dan anak
- f. Kebijakan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:
- Membangun kerjasama team work
  - Melakukan Monitoring Evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang sudah dilakukan, serta melakukan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan program/kegiatan yang belum/tidak tercapai
  - Merumuskan dan membuat perencanaan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program/kegiatan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja serta pencapaian Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 2.1.1 di bawah ini:

Tabel 2.1.1  
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023  
Sampai dengan Triwulan II (Periode Juni 2023)  
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Akhir Tahun 2021 (n-2)				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab	Hambatan/Kendala	Tidak Lanjut									
					K		Rp		K		Rp		I		II		III		IV		K		Rp															
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23															
1	2	3	4																																			
		Semua Bidang																																				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																																	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah		100	5,828,506,034	1,209,553,768	1,952,218,110																														
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		100	32,222,000	441,700	5,776,100	0,00																													
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD		100	8,354,000	441,700	3,600,000																														
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		100	5,997,900	36	2,176,100																														
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD		100	3,417,600	40																															
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD		100	1,212,000																																
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		100	4,786,600	40																															

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Kinerja RPJMD sampai dengan RPJMD Tahun 2021 (Rp-2)		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (r-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trwulan												Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2023 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab	Hambatan/ Kendala	Tindak Lanjut		
					II				III				IV				12		13=12/rx100%			14 = 6 + 12						15=14/5 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp					K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17													
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah			6.542.000	5	10			15																		
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (100%)</b>			4.371.816,496	19	34	0	0	53																		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN			4.371.816,496	19	34			53																		
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</b>			238.694,357	34	17	0	0	51																		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			5.000.000	40				40																		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			73.925,001	20	32			52																		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan			14.523,553	14	10			24																		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan			28.483,647	31	24			55																		
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan			18.515,720	81				81																		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan			7.728,000	17	25			42																		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			90.418,536	36	30			66																		
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>			448.632,581	25	51	0	0	76																		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan			125.208,000	100				100																		
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan			55.648,000		100			100																		

*Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023*



No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2021 (t-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (t-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	Hambatan/ Kendala	Tindak Lanjut				
					K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16	17											
		Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pemberintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	100	85.991,100	0,00	73	37.139,000	0	0	73	43,19%	25	8.630,000	0,00%												
		Kordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	52.990,000	0	25	8.630,000			25	16,29%	25	8.630,000	0,00%												
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peringkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	12.044,400	0	100	11.960,000			100	99,30%	100	11.960,000	0,00%												
		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peringkat Daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten / Kota	100	20.956,700	0	85	16.549,000			85	78,87%	85	16.549,000	0,00%												
		Pemberdayaan Perempuan dan Organisasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	100	97.262,600	0,00	10	4.302,000	0	0	10	4,42%	10	4.302,000	0,00%												
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan Kabupaten/Kota	100	97.262,600	0	10	4.302,000			10	4,42%	10	4.302,000	0,00%												





No	Sasaran RPKD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2021 (n-2)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	Hambatan/Kendala	Tindak Lanjut				
				K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp							
								8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%											
1	2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	100	25.000.000	20.00	80	21.064.600	0	0	0	0	21.064.600	0	0	0	0	84,26%	0	0	0,00%	0,00%	16			
		Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan kewenangan kabupaten/kota	100	25.000.000	20	80	21.064.600											100%	100	21.064.600	0,00%	0,00%			
		<b>PROGRAM Peningkatan Kualitas Keluarga</b>	Meningkatnya kualitas keluarga di Kota Dumai	100	5.999.300		0												0,00%			0,00%			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat daerah kabupaten/kota	100	5.999.300	0,00	0,00												0,00%			0,00%				
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	100	5.999.300	0													0%	0		0,00%	0,00%			
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Meningkatnya pemanfaatan data terpadu gender dan anak	100	24.999.980			14.641.900	0	0	0	0	14.641.900	0	0	0	0	0,00%	0,00%			58,57%	0,00%			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tertelaksananya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data terpadu gender dan anak dalam kelembagaan data di kota Dumai	100	24.999.980	15,00	23	14.641.900	0	0	0	0	14.641.900	0	0	0	0	58,57%				58,57%				
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	100	13.999.500	15	35	10.532.900											50%	50	10.532.900	0,00%	0,00%			

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023

No	Sasaran RPKD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPJMD Tahun 2021 (t-2)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Pelaksanaan RPKD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	Hambatan/Kendala	Tindak Lanjut					
				6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%					14=6+12		15=14/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp	
1	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota	100	11,004,480	15	4,109,000	10	4,109,000	0	0	0	0	25	4,109,000	25%	37.34%	25	4,109,000	0.00%	0.00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
		<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>		Meningkatnya capaian kota layak anak	100	68,980,200	-	28,645,600	0	28,645,600	0	0	0	0	0	0	41.52%										
		<b>Pembinaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemerintahan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	100	6,449,700	0.00	50.00	0	50.00	0	0	0	0	50.00	50.00	0.00%	0.00%	50	50.00	0.00%	0.00%					
		<b>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemerintahan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	100	6,449,700	0	50.00	0	50.00	0	0	0	0	50.00	50.00	0.00%	0.00%	50	50.00	0.00%	0.00%					
		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		Jumlah dokumen hasil penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	100	62,540,500	2.50	40.00	0	40.00	0	0	0	0	42.50	42.50	45.80%										
		<b>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	49,993,300	0	50.00	0	50.00	0	0	0	0	50.00	50.00	51.62%										
		<b>Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	100	12,547,200	5	30.00	0	30.00	0	0	0	0	35.00	35.00	22.64%										

No	Sasaran RAKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan dengan RAKPD Tahun 2021 (0-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (0-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RAKPD Tahun 2023 yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RAKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RAKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran dan RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab	Hambatan/Kendala	Tindak Lanjut
					K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	1	2	3	4	5	6	7	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16	17											
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Meningkatnya perlindungan khusus anak	-	-	467,453,580	-	137,113,003	15	0	137,113,003	28.33%															
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	-	-	81,592,000	0.00	0.00	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%													
		Kordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/kota	100		81,592,000	0				0	0%	0	0.00%													
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	-	-	284,201,580	10.00	75,433,100	15	0	75,433,100	26.54%															
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	100		29,699,580	15	20,223,100			20,223,100	67.41%	67	20,223,100	0.00%												
		Kordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	100		254,202,000	5	55,210,000	15		55,210,000	21.72%	55	55,210,000	0.00%												
		Penggiatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penggiatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	100		101,660,000	0.00	61,679,903	0	0	61,679,903	60.67%															

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Akhir Periode RPJMD dengan RPJMD Tahun 2021 (t-2)		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (t-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Pelaksanaan RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	Hambatan/Kendala	Tindak Lanjut						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I			II			III			IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp									
				8		9		10		11		12		13=127x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17																
1	2	Kordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kordinasi dan sinkronisasi peningkatan kualitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	100	101,860,000	0	61	61,679,903	61	61,679,903	61%	60,67%	61	61,679,903	0,00%	0,00%																						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										51,69%	Rendah	50,20%	Rendah	Predikat Kinerja												51,69%	Rendah	50,20%	Rendah	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		3,436,321,281	51,69%	Rendah	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Rendah	Rendah

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah



### **2.2.1.1 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

#### **2.2.1 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai**

Peraturan Wali Kota Dumai No. 78 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa jajaran structural dan jajaran fungsional dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut:

- 1. Kepala**
- 2. Sekretariat**, terdiri dari:
  - a. Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 3. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga**, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- 4. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak**, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- 5. Bidang Perlindungan Hak Perempuan**, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- 6. Bidang Data Informasi Gender dan Anak**, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- 7. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak**, terdiri dari:
  - Kepala Unit Pelaksana Teknis.
  - Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
- 8. Jabatan Fungsional dan atau Jabatan Pelaksana**

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPT PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. UPT PPA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Fungsi UPT PPA adalah menyelenggarakan layanan :

- a. Pengaduan masyarakat
- b. Penjangkauan korban
- c. Pengelolaan kasus
- d. Penampungan sementara
- e. Mediasi dan
- f. Pendampingan korban

UPT PPA merupakan UPT generik yang dalam prinsip pembentukannya berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis. Kebijakan pembentukan UPT PPA sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPT PPA. Pembentukan UPT PPA Kota Dumai ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang yang diperlihatkan dalam tabel di bawah ini :

**TABEL 2.2.1.1**  
**PROPORSI JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022**

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 orang	5,6	32 orang	62,8	33 orang	47,8
2.	Tenaga Kerja Perjanjian Kontrak (TKPK)	17 orang	94,4	19 orang	37,2	36 orang	52,2
TOTAL		18 orang	100	51 orang	100	69 orang	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022

Dari data di atas menunjukkan bahwa proporsi pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai didominasi oleh tenaga kerja dengan perjanjian kontrak (TKPK) sebanyak 36 orang dari jumlah seluruh pegawai yaitu 69 orang atau 52,17%. Tenaga Kerja Perjanjian Kontrak (TKPK) terdiri dari tenaga psikolog 1 orang, tenaga pendamping/ penyuluh 12 orang, tenaga administrator 11 orang, tenaga kebersihan 4 orang, tenaga keamanan 6 orang, dan tenaga supir 2 orang.

Adapun proporsi jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**TABEL 2.2.1.2**  
**PROPORSI JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022**

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
1.	20 s/d 30 tahun	7	38,9	15	29,4	22	31,9
2.	≥ 30 s/d 40 tahun	6	33,3	8	15,7	14	20,3
3.	≥ 40 s/d 50 tahun	3	16,7	17	33,3	20	29
4.	≥ 50 s/d 65 tahun	2	11,1	11	21,6	13	18,8
<b>TOTAL</b>		18	100	51	100	69	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 terbanyak berada pada kelompok umur antara 20 s/d 30 tahun yaitu sebanyak 22 orang atau 31,88%, dan kelompok umur terkecil berada pada usia  $\geq 50$  s/d 65 tahun sebanyak 13 orang atau 18,84%. Dari seluruh kelompok umur tersebut didominasi oleh pegawai perempuan sebanyak 51 orang dari jumlah seluruh pegawai yang ada yaitu 69 orang atau sebesar 73,91%. Melihat dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata pegawai yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 berada pada kelompok usia produktif. Hal ini dapat menjadi factor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

Adapun komposisi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada Tahun 2022 sebanyak 33 ( tiga puluh tiga ) orang yang dibagi berdasarkan :

1. Tingkat Pendidikan

Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**TABEL 2.2.1.3**  
**JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>Persentase</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Strata II	6 Orang	18,2	
2.	Strata I	24 Orang	72,7	
3.	Diploma III	3 Orang	9,1	
Jumlah		33 Orang	100	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022



Data dari tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 memiliki pendidikan Strata I sebanyak 24 orang atau 72,73% dan tingkat pendidikan terendah adalah Diploma III sebanyak 3 orang atau 9,09%.

1. Berdasarkan Jabatan

Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan jabatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL 2.2.1.4**  
**JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN JABATAN PADA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA DUMAI TAHUN 2022**

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
I.	Jabatan Struktural	1 Orang	8 Orang	9 Orang	27,3
II.	Jabatan Fungsional Tertentu (Penyetaraan)	0 Orang	14 Orang	14 Orang	42,4
III.	Jabatan Fungsional Umum	0 Orang	10 Orang	10 Orang	30,3
Total		1 Orang	32 Orang	33 Orang	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022

Data pada tabel di atas menggambarkan bahwa Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 yang memegang jabatan baik pada jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu didominasi oleh kaum perempuan yaitu sebanyak 32 orang atau 96,97%.

Berikut disajikan juga data jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan jabatan structural pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 seperti yang terdapat pada tabel 2.2.1.5 di bawah ini :

**TABEL 2.2.1.5**  
**JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN JABATAN**  
**STRUKTURAL PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022**

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
I.	Jabatan Struktural :			
a.	Esselon II b	0	1 Orang	1 Orang
b.	Esselon III a	0	1 Orang	1 Orang
c.	Esselon III b	1 Orang	3 Orang	4 Orang
d.	Esselon IV a	0	2 Orang	2 Orang
e.	Esselon IV b	0	1 Orang	1 Orang
Total		1 Orang	8 Orang	9 Orang

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022

## 2. Pangkat dan Golongan

Data jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan pangkat dan golongan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.2.1.6 di bawah ini :

**TABEL 2.2.1.6**  
**JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT PANGKAT DAN**  
**GOLONGAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022**

No	Jabatan	Golongan Ruang	Jumlah	%
I.	Pembina Tk. I	IV/b	3	9,09
II.	Pembina	IV/a	5	15,1
III.	Penata Tingkat I	III/d	15	45,5
IV.	Penata	III/c	4	12,1
V.	Penata Muda Tingkat I	III/b	5	15,1
VI.	Penata Muda	III/a	1	3,0
J U M L A H			33 Orang	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Dumai Tahun 2022 terbanyak berada pada pangkat Penata Tingkat I dengan golongan ruang III/d sebanyak 15 orang atau 45,46%.

Indikator kinerja Dinas PPPA Kota Dumai merujuk pada Bab VIII Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026. Adapun indikator kinerja Dinas PPPA Kota Dumai Tahun 2022 sesuai RPJMD 2021 – 2026 sebagai berikut :

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 terbanyak berada pada pangkat Penata Tingkat I dengan golongan ruang III/d sebanyak 16 orang atau 48,48%.

### 2.2.2 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**TABEL 2.2.2.1**  
**TABEL INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS BESERTA**  
**TARGET DAN REALISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standart	%	95	100	105.3
		Skor Pencapaian Kota Layak Anak	Skor	750	703.5	93.8
		Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Skor	3862	3862.5	100

*Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023*

Dari table di atas menunjukkan bahwa capaian semua indikator kinerja sasaran strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sudah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan atau dengan kata lain kinerja yang dihasilkan termasuk dalam kategori baik.

Pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada table berikut ini :

**TABEL 2.2.2.2**  
**TABEL PENGUKURAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2023**

No	Indikator	Capaian 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian S/D 2023 Terhadap Renstra 2023 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi %		
1	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standart	100	95	100	105	95	105
2	Skor Pencapaian Kota Layak Anak	703.5	750	703.5	93.8	900	93.8
5	Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	3862.5	3862	0	100	4300	100

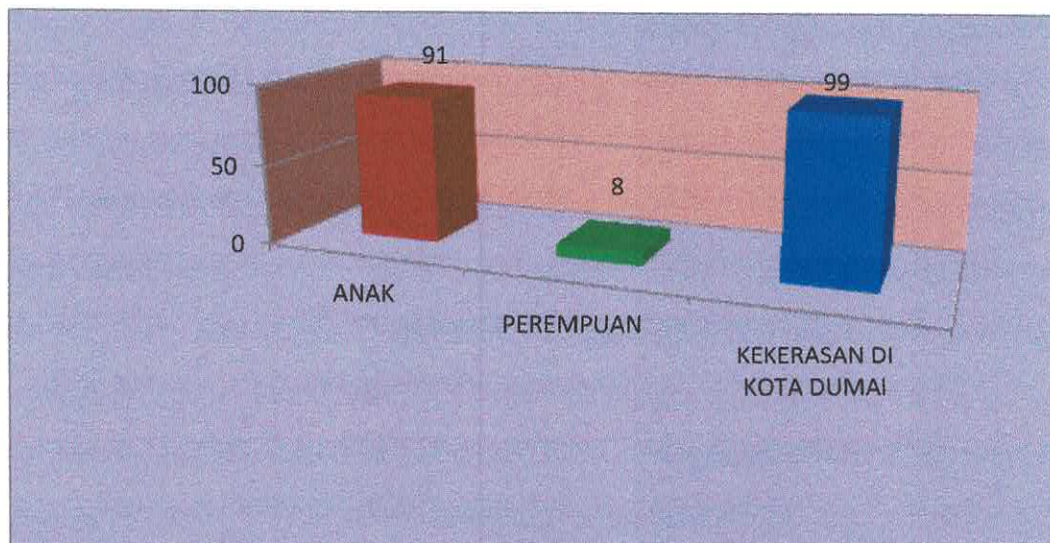
Dari tabel pengukuran kinerja SKPD tahun 2023 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

**A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

- a. Indikator Kinerja Sasaran: Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu sesuai standar.

Dari laporan yang tercatat pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Dumai tahun 2023, terdapat 8 korban kekerasan pada perempuan dan 91 adalah korban kekerasan pada anak, sehingga total keseluruhan korban kekerasan pada perempuan dan anak sebanyak 99 korban. Dari keseluruhan korban di atas telah mendapat penanganan pengaduan sesuai standar atau sebesar 100% dari 95% target yang ditetapkan pada tahun 2023. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja untuk indikator tersebut sangat baik. Berikut disajikan grafik kekerasan baik pada anak maupun perempuan yang ditangani di UPT PPA Kota Dumai.

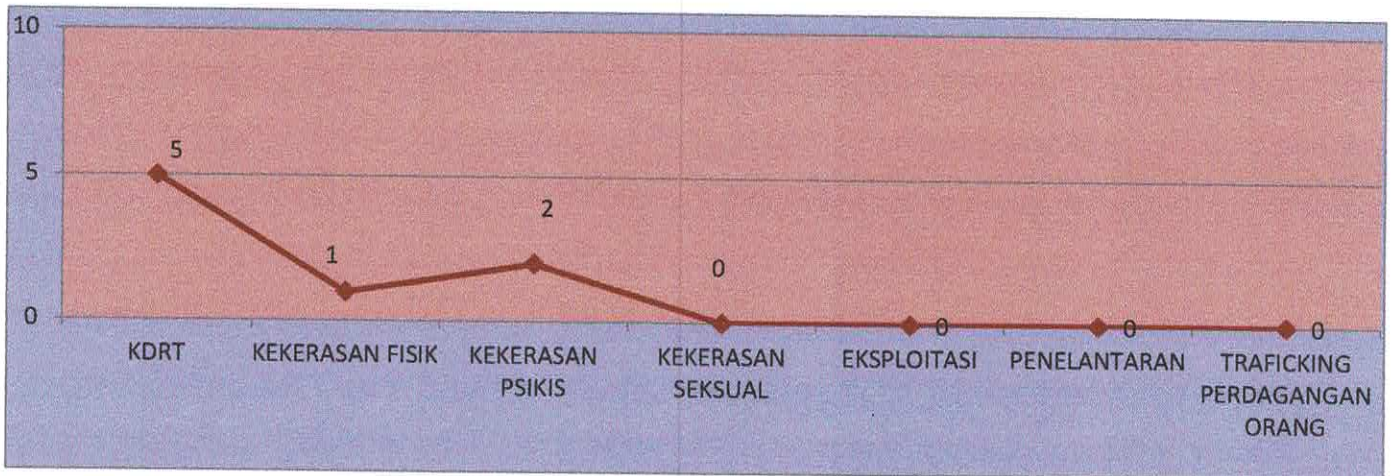
**GRAFIK A.1**  
**JUMLAH KORBAN KEKERASAN YANG DATANG KE UPT PPA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**



*Sumber : UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023*

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kekerasan di Kota Dumai sampai dengan Triwulan II sebanyak 99 korban , dimana korban kekerasan pada perempuan sebanyak 8 orang dan korban kekerasan pada anak sebanyak 91 orang. Dari 8 korban kekerasan terhadap perempuan tersebut terdiri dari beberapa jenis kasus antara lain KDRT sebanyak 5 kasus, kekerasan fisik sebanyak 1 kasus, kekerasan psikis sebanyak 2 kasus seperti yang terdapat pada grafik di bawah ini :

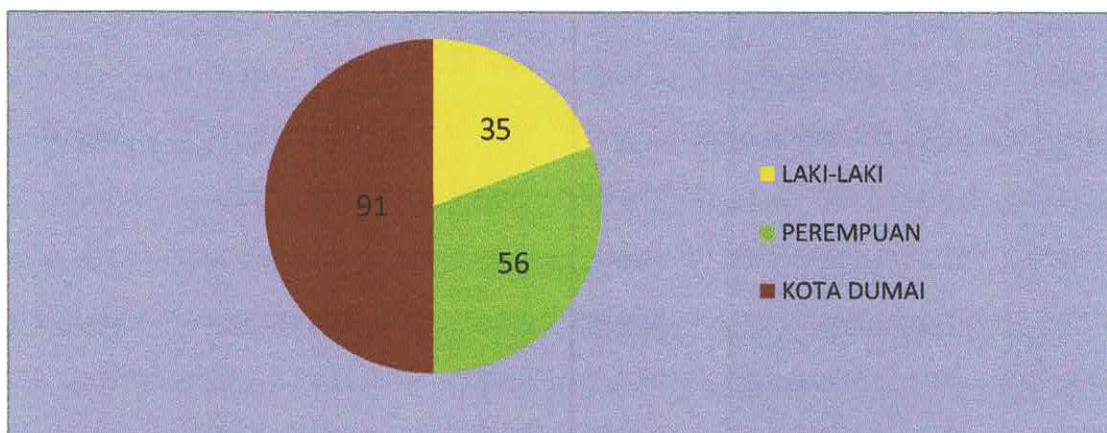
**GRAFIK A.2**  
**JUMLAH KEKERASAN PEREMPUAN BERDASARKAN JENIS KASUS**  
**PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**  
**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**



Sumber : UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023

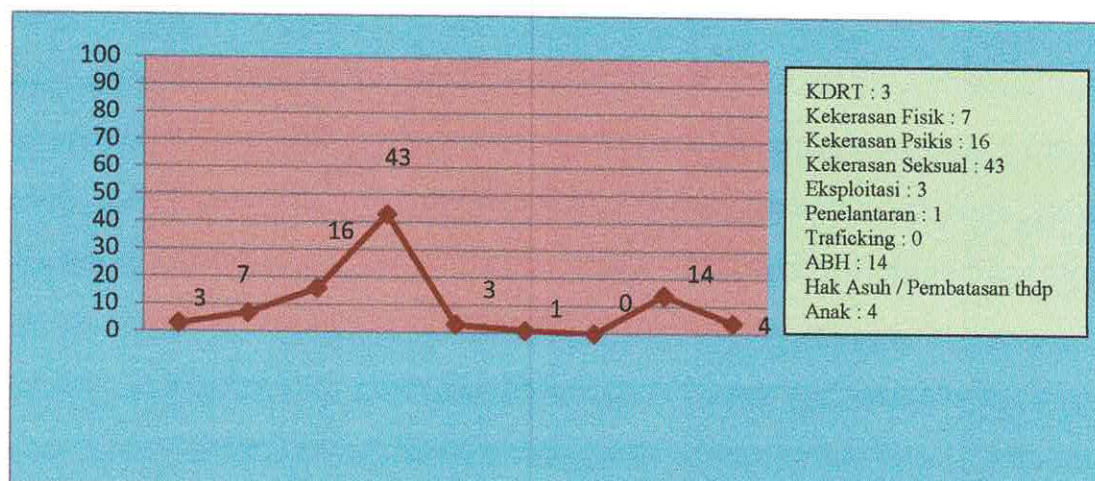
Dari keseluruhan korban kekerasan pada perempuan yang datang ke Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT – PPA) semuanya sudah ditangani sesuai standar yang berlaku. Untuk kekerasan yang terjadi pada anak sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebanyak 91 korban yang terdiri dari korban laki-laki sebanyak 35 orang, dan korban perempuan sebanyak 56 orang seperti yang disajikan pada grafik di bawah ini :

**GRAFIK A.3**  
**JUMLAH KEKERASAN ANAK BERDASARKAN JENIS KASUS**  
**PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**



Sumber : UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023

**GRAFIK A.4**  
**JUMLAH KEKERASAN ANAK BERDASARKAN JENIS KASUS**  
**PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**



*Sumber : UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023*

b. Indikator Kinerja Sasaran : Skor Pencapaian kota layak anak

Pada tahun 2022 skor pencapaian kota layak anak untuk Kota Dumai sebesar 703,5 dari target 700, dengan kata lain telah melebihi target yang ditetapkan. Dan pada tahun 2023 Kota Dumai masih menduduki peringkat Nindya dengan skor 703,5.

c. Indikator Sasaran Kinerja : Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya.

Target pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kota Dumai pada tahun 2023 dengan skor 3862. Awal penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kota Dumai dilaksanakan pada tahun 2020 meraih predikat Utama dengan skor 3862.5. Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 pelaksanaan penilaian APE tidak dilaksanakan sehingga skor pencapaian APE Kota Dumai Tahun 2021 dan 2022 masih berada pada skor 3862.5. Untuk tahun 2023 pelaksanaan APE akan direncanakan sebelum akhir tahun 2023 sehingga untuk kondisi saat ini Kota Dumai masih menggunakan skor 3862.5 dengan predikat utama.

### **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

1. Tingkat kinerja pelayanan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan hal kritis yang terkait dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar.

Pada tahun 2021 cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar sebesar 94,7% dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 100%, dimana jumlah korban kekerasan perempuan di Kota Dumai pada tahun 2022 tercatat sebanyak 21 orang dan korban kekerasan pada anak sebanyak 114 orang. Dengan demikian total korban kekerasan pada perempuan dan anak pada tahun 2022 sebanyak 135 orang dan jumlah korban yang telah mendapat penanganan pengaduan sesuai standar sebanyak 135 orang atau 100%. Hal ini bermakna bahwa cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar di Kota Dumai pada tahun 2022 telah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 95%. Dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut terjadi peningkatan terhadap capaian indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar. Hal ini menggambarkan tentang kualitas pelayanan terhadap penanganan atau tindak lanjut kasus kekerasan



pada perempuan dan anak di Kota Dumai dimana semua kasus kekerasan yang dilaporkan ke UPT PPA Kota Dumai telah ditindaklanjuti atau telah mendapat penanganan sesuai standar.

b. Skor pencapaian Kota Layak Anak (KLA)

Pada tahun 2021 skor pencapaian kota layak anak untuk kota Dumai sebesar 695,14 dari target 650 dan pada tahun 2022 Kota Dumai telah mendapat skor 703,5 dari skor 700 yang ditargetkan pada tahun 2022 atau sebesar 100,5% dengan kata lain telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2022. Selama 4 tahun berturut-turut Kota Dumai telah berhasil meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak dengan skor 695,14 atau dengan predikat Madya, dan meningkat skor yang diraih pada tahun 2022 menjadi 703,5 dengan predikat Nindya. Pencapaian indikator tersebut telah melebihi dari target yang ditentukan pada tahun 2022 dengan skor 700 atau capaian sebesar 100,5% (melebihi target). Adapun penilaian Kota Layak Anak terbagi atas 4 predikat yaitu (1) Pratama dengan range skor 500-600, (2) Madya dengan range skor 600-700, (3) Nindya dengan range skor 700-800 dan (4) Utama dengan range skor 800-900, serta Kota Layak Anak dengan range skor 900-1000.

c. Skor pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

Target pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kota Dumai pada tahun 2022 dengan skor 3187. Pada Tahun 2000 Kota Dumai telah mendapat penghargaan APE dengan predikat Utama dengan skor 3862.5. Tahun 2021 dan 2022 pelaksanaan penilaian APE tidak dilaksanakan sehingga skor pencapaian APE Kota Dumai masih berada pada skor 3862.5 atau sebesar 100 % dari skor yang sudah ditargetkan pada tahun 2022 yaitu 3187. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja untuk indikator tersebut sudah melebihi target yang diharapkan dengan

kata lain bahwa indicator tersebut termasuk dalam kategori sangat baik.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - a. Belum optimalnya kualitas pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
  - b. Belum optimalnya pelaksanaan program kegiatan pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti kegiatan pemberdayaan perempuan, pencegahan serta penanganan kasus – kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dalam pelaksanaannya membutuhkan tenaga – tenaga ahli dan professional dibidangnya seperti Psikolog, Psikiater, serta tenaga ahli lainnya.
  - c. Belum optimalnya penyelenggaraan hak-hak anak sebagaimana ketentuan yang terkandung dalam UU perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014
  - d. Belum optimalnya pendataan gender dan anak di Kota Dumai yang disebabkan karena belum semua Perangkat Daerah terkait menggunakan system data terpisah.

Sedangkan hambatan yang dihadapi yaitu minimnya anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sehingga belum semua program – program kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada pencapaian Visi Kota Dumai yaitu ***“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman).”***

3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Wali Kota Dumai, terhadap Capaian Program Nasional/ Internasional

Unsur Visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai

adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjiwa melayu yang mengandung makna bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena manusia sebagai objek dan subjek dalam pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional dan berdaya saing global. Melalui Misi tersebut kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai harus dilaksanakan sejalan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai setiap tahunnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai mendukung pencapaian Misi ke -2 Pemerintah Kota Dumai yaitu ***“Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas dan Berjiwa Melayu.”***

Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai dengan sasaran yaitu meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas PPPA

a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas PPPA Kota Dumai pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.

- 2) Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
  - 3) Pengungkapan kasus-kasus kekerasan termasuk TPPO terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
  - 4) Adanya kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan, dan menjamin kelangsungan hidup dalam pemenuhan hak anak.
- b. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan kesetaraan dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJPN, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Riau, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- 2) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 mengamanatkan sinkronisasi sasaran antara Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Kabuapten /Kota sehingga memudahkan pencapaian target Nasional maupun target Pemerintah Daerah dalam pembangunan responsif gender.
- 3) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) memberikan kesempatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga PBB dan atau lembaga Donor dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- 4) Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) .

- 5) Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus perempuan dan anak.
  - 6) Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
  - 7) Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Formulasi Isu-Isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan.

Adapun rekomendasi dan strategis dilakukan dalam merumuskan program dan kegiatan :

- a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah, meningkatkan partisipasi perempuan untuk menjadi anggota legislatif, mengadvokasi pimpinan Partai Politik untuk menempatkan perempuan sebagai calon legislatif, fasilitasi pembentukan *gender champion*, pemberian pelatihan keterampilan bantuan alat bagi kelompok rentan, meningkatkan kapasitas perencanaan dalam Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender, meningkatkan cakupan Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan memperkuat kelembagaan Pengarusutamaan Gender serta pemanfaatan data terpilah.
- b. Memperkuat kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui :

- 1) Penguatan regulasi dalam penanganan kasus termasuk penegakan hukum yang berkeadilan,
  - 2) Koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah,
  - 3) Peningkatan pemahaman Pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang,
  - 4) Pemulihan korban reintegrasi sosial,
  - 5) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan penanganan korban,
  - 6) Fasilitasi penyediaan bantuan hukum bagi yang membutuhkan.
- c. Mempercepat capaian peringkat Kota Layak Anak melalui :
- 1) Pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak,
  - 2) Penguatan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pencapaian Kota Layak Anak .
  - 3) Peningkatan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
  - 4) Advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
  - 5) Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data gender dan anak dalam pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan di Kota Dumai.
- d. Meningkatkan perlindungan anak berkebutuhan khusus melalui harmonisasi berbagai kebijakan perlindungan khusus anak, memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di Kota Dumai untuk peningkatan efektifitas dan

- efisiensi pemenuhan hak anak, menguatkan kapasitas anak berkebutuhan khusus, menyediakan sarana dan prasarana penunjang, serta memperkuat keberdayaan anak berkebutuhan khusus agar setara dengan anak-anak lainnya.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender melalui workshop perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang, pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender, mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil Pengarusutamaan Gender di tingkat kota, memperkuat lembaga/ jejaring Pengarusutamaan Gender di Kota Dumai untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data gender dan anak.
  - f. Meningkatkan kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan regulasi dan perbaikan layanan penunjang tugas dan fungsi.

#### **2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan publik, maupun didasarkan hasil dari pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang RKPD.

Tabel 2.4

**Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Telaah Visi, Misi dan Program pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026**

Faktor Penghambat		Faktor Pendorong	
Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
<p>a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.</p> <p>b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.</p>	<p>a. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.</p> <p>b. Munculnya berbagai pengaruh dari media sosial sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan oleh perempuan dan anak dalam mengendalikan kualitas kehidupan.</p>	<p>a. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.</p> <p>b. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan</p>	<p>a. Kebijakan kesetaraan dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJPN, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Riau, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.</p> <p>b. UU 23 tahun 2014 mengamanatkan sinkronisasi sasaran antara Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota sehingga memudahkan pencapaian</p>



<p>c. Pengungkapan kasus-kasus kekerasan termasuk TPPO terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.</p> <p>d. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki <i>smartphone</i> menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.</p> <p>e. Perkembangan IT yang sangat cepat menuntut penyediaan data berbasis IT yang harus dipenuhi oleh</p>		<p>target nasional maupun target pemerintah daerah dalam pembangunan responsif gender.</p> <p>c. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) memberikan kesempatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dan atau lembaga Donor dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.</p> <p>d. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA</p>
	<p>kualitas pemenuhan hak anak.</p> <p>c. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.</p>	

<p>Kota Dumai yang terkoneksi dengan pemerintah Provinsi Riau.</p> <p>f. Adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan, dan menjamin kelangsungan hidup dalam pemenuhan hak anak.</p>		<p>(meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).</p> <p>e. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.</p>
---	--	---

f.	Adanya kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.	dukungan dalam
g.	Banyaknya organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021-2026 terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagai berikut :

1. Arah kebijakan pemberdayaan perempuan.
  - 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG).
  - 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.
2. Arah kebijakan perlindungan anak.
  - 1) Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal.
  - 2) Peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
  - 3) Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

Sedangkan sasaran kebijakan RPJMN, sebagai berikut:

- a) Sasaran Pemberdayaan Perempuan.

Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Berdasarkan pasal 258 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target”, Dinas PPPA Kota Dumai yang merupakan bagian dari OPD Pemerintah Kota Dumai yang memiliki urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada arah kebijakan nasional dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI. Agar sinkronisasi dan harmonisasi antara Kementerian

PPPA RI dengan Dinas PPPA di Provinsi/Kab/Kota dapat terwujud maka diperlukan adanya penyelarasan kegiatan prioritas nasional yang didukung oleh Kementrian/Lembaga (APBN) dengan kegiatan pendukung dari daerah yang bersumber dari APBD. Adapun prioritas pembangunan rencana kerja pemerintah daerah Kota Dumai tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industry dan kepelabuhanan.
2. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu
3. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
5. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

#### 1. Tujuan

Tujuan yang akan ditempuh dalam lima tahun Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah : Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai

#### 2. Sasaran

Sasaran yang akan ditempuh dalam lima tahun Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah : Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

#### 3. Kebijakan

- a. Penurunan kasus kekerasan perempuan termasuk TPPO yang fokus pada peningkatan, pencegahan, pelayanan, pemberdayaan korban kekerasan perempuan, dan penguatan lembaga/ jaringan.
- b. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender yang berfokus pada PPRG serta monitoring dan evaluasi pada setiap OPD dalam pelaksanaan PPRG

- c. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan, monitoring, dan evaluasi perempuan potensial bakal calon anggota legislatif, legislatif dan jabatan publik
- d. Meningkatnya pelayanan PUSPAGA yang sesuai standar yang berfokus pada pelatihan tenaga terampil dan penguatan kelembagaan PUSPAGA.
- e. Meningkatnya usaha ekonomi yang dikelola perempuan berfokus pada pelatihan keterampilan dan manajemen usaha dan pendampingan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS).
- f. Peningkatan kualitas kelembagaan organisasi perempuan dan anak yang berfokus pada pembinaan kelembagaan organisasi perempuan dan anak
- g. Peningkatan keterlibatan pemerintah, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA) yang berfokus pada peningkatan predikat Kota Layak Anak
- h. Pemberian pelayanan konseling, mediasi dan pendampingan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan
- i. Peningkatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan perempuan dan anak
- j. Mewujudkan kota Dumai sebagai kota layak anak

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, serta visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disampaikan oleh Walikota dan Walikota terpilih pada saat kampanye, maka visi pembangunan yang ditetapkan selama kurun waktu 2021 – 2026 yaitu **“TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU”**

Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yaitu:

- 1) Masyarakat Dumai yang makmur; keadaan masyarakat kota Dumai yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya secara layak, lahir dan batin.
  - a) Layak: wajar; pantas; patut; mulia; terhormat
  - b) Lahir: keduniaan; jasmani
  - c) Batin: sesuatu yang terdapat di dalam hati; sesuatu yang menyangkut jiwa ( perasaan hati dan sebagainya).
- 2) Masyarakat Dumai yang madani: Keadaan masyarakat kota Dumai yang menjunjung tinggi nilai, norma hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi ber peradaban.
  - a) Nilai : sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai hakikatnya
  - b) Norma : aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima; aturan, ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu;
  - c) Hukum : peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
  - d) Berperadaban yang memiliki kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin; hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa dan kebudayaan suatu bangsa.
- 3) Tahun 2026 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa jabatan kepala daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing yang berarti Misi ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena manusia sebagai Objek dan Subjek dalam pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Sejalan dengan

pesatnya pembangunan serta terbukanya arus globalisasi sehingga dibutuhkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing global.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

- 1.1 Mengembangkan perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri.
- 2.1 ***Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berjati diri melayu.***
- 3.1 Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas.
- 4.1 Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan daerah yang baik

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai mendukung pencapaian misi ke-2 ***“Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berjati diri melayu”*** Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di kota

### **3.3.1 PROGRAM**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBD.

Ada 7 (Tujuh) program yang direncanakan oleh Dinas PPPA Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/kota
2. Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
3. Program Perlindungan Perempuan
4. Program Peningkatan Kualitas keluarga
5. Program Pengelolaan sistem data gender dan anak
6. Program Perlindungan hak anak (PHA)
7. Program Perlindungan khusus anak



### 3.3.2 KEGIATAN

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya, berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

Ada 19 (Sembilan Belas) kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi keuangan perangkat daerah
3. Administrasi umum perangkat daerah
4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
7. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota
8. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota
9. Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/Kota
10. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/kota
11. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota
12. Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota
13. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kabupaten/Kota

14. Pengumpulan, pengolahan nalisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah kabupaten/kota
15. Pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintah, Nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota
16. Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/Kota
17. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
18. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/Kota
19. Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota

**BAB IV**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA**  
**DUMAI**

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini :

**TABEL. 4.1**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**  
**TAHUN 2023**

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
									Sebelum	Sesudah				Sebelum		Sesudah			
2																			
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																		
2	08																	8,748,834,990	
2	08	01																7,209,534,952	
2	08	01	2.01															110,000,000	
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Kota Dumai, Kota Dumai, Kecamatan, Kelurahan	100%	3	Dokumen	16	Dokumen	8,354,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100 %	25,000,000
2	08	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Kota Dumai, Kota Dumai, Kecamatan, Kelurahan	100%	2	Dokumen	16	Dokumen	5,997,900	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100 %	35,000,000
2	08	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Kota Dumai, Kota Dumai, Kecamatan, Kelurahan	100%	2	Dokumen	16	Dokumen	1,911,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100 %	7,000,000

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Capaian Program		Indikator Kinerja		Lokasi Output Kegiatan		Rencana Tahun 2023				Praktiraan Maju Rencana Tahun 2024	
										Target Capaian Kinerja				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Kehadiran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program Sebelum	Kehadiran Sub Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sesudah	Sesudah	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
														Sebelum	
2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	16 Dokumen	100 %	1 Dokumen	3,417,800	11 Dokumen	3,417,800	100 %	8,000,000		
2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	16 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1,212,000	11 Dokumen	1,212,000	100 %	5,000,000		
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	2 Laporan	100 %	2 Laporan	4,786,800	11 Dokumen	4,786,800	100 %	20,000,000		
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	16 Dokumen	100 %	1 Laporan	6,542,000	11 Dokumen	6,542,000	100 %	10,000,000		
2.08.01.2.01.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,371,816,496		4,644,387,571		4,644,754,209		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target			
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
2 08 01 2.02 01	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	15 Dokumen	15 Dokumen	4,371,816,496	4,644,387,571	100 %	4,629,754,209
2 08 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	0 Laporan	15 Dokumen	15 Dokumen	0	0	100 %	15,000,000
2 08 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0		35,000,000
2 08 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya dokumen/laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	0 Laporan	11 Dokumen	0 Dokumen	0	0	100 %	35,000,000
2 08 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0		100,411,692
2 08 01 2.05 02	Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya dokumen/laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	68 Paket	0 Paket	5 Dokumen	0 Dokumen	0	0	100 %	55,411,692
2 08 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya dokumen/laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Orang	0 Orang	5 Dokumen	0 Dokumen	0	0	100 %	20,000,000

Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
Kode	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
								Sebelum	Sesudah	Sebelum								Sesudah
2 08 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-Undangan	Tersedianya dokumen/laporan administrasi kepegawatan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Orang	0 Orang	5 Dokumen	0 Dokumen	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	100 %	25,000,000		
2 08 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>															<b>361,487,506</b>	<b>389,974,370</b>	
2 08 01 2.05 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya dokumen/laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	100 %	10,000,000		
2 08 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya dokumen/laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	100 %	82,000,000		
2 08 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya dokumen/laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	100 %	18,000,000		
2 08 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya dokumen/laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Paket	3 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	100 %	26,000,000		
2 08 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Tersedianya dokumen/laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Paket	3 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	100 %	38,000,000		

Rencana Tahun 2023										Praktiraan Maju Rencana Tahun 2024								
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program Sebelu	Program Sesudah	Keluaran Sub Kegiatan Sebelum	Keluaran Sub Kegiatan Sesudah		Hasil Kegiatan Sebelum	Hasil Kegiatan Sesudah		Tolok Ukur	Target		
2	08 01 2.06 06	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-undangan Disetdiakan	Tersedianya dokumen/ laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1	1	1	1	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	7,728,000	7,728,000	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	100 %	10,598,400
2	08 01 2.06 09	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya dokumen/ laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	60	1	1	1	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	90,418,436	193,991,585	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	100 %	205,375,970
2	08 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>												<b>125,208,000</b>	<b>498,532,581</b>			<b>783,324,581</b>
2	08 01 2.07 01	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya unit pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1	1	1	1	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	125,208,000	125,208,000	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	100 %	460,000,000
2	08 01 2.07 05	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya unit pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	14	14	14	14	100 %	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	55,648,000	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	100 %	55,648,000
2	08 01 2.07 06	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya unit pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5	8	8	8	100 %	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	85,998,492	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	100 %	85,998,492



Kode		Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Capaian Program		Kehadiran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan		Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
														Target Capaian Kinerja		Catatan Penting		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Program		Pagu Indikatif (Rp.)	
2	08	01	2.07	10	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya unit pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Unit	1 Unit	30 unit	24 unit	0	231,678,089	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	181,678,089	1,008,570,100					
																					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	50 laporan	3 laporan	174,000	174,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	100 %	200,100						
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Kelurahan	100 %	100 %	36 Laporan	1 Laporan	50 laporan	3 laporan	113,560,000	99,160,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100 %	132,250,000						
2	08	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	0 Laporan	50 laporan	3 laporan	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100 %	15,000,000						
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	1 Laporan	50 laporan	3 laporan	502,800,000	745,020,120	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	861,120,000						
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									119,141,000	134,141,000			137,500,000							

Rencana Tahun 2023												Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Program	Target Capaian Kinerja				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
			Kehadiran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan	Kehadiran Sub Kegiatan			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	34 unit	26 unit	38,530,000	38,530,000	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	100 %	50,000,000		
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	34 unit	26 unit	68,221,000	83,221,000	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	100 %	65,000,000		
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Unit	8 Unit	34 unit	26 unit	5,680,000	5,680,000	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	100 %	6,500,000		
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	11 Unit	0 Unit	34 unit	26 unit	0	0	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	100 %	8,000,000		
2.08.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	11 Unit	11 Unit	34 unit	26 unit	6,710,000	6,710,000	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	100 %	8,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
					Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	08 02	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>																	
2	08 02 2.01	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>																	
2	08 02 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG di Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah dan kewenangan kabupaten/kota	Tercapainya pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah dan kewenangan kabupaten/kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	15 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0	52,990,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase ARG di Kota Dumai	15 %	72,054,515	
2	08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase ARG di Kota Dumai	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) kewenangan kabupaten/kota	Tercapainya pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah dan kewenangan kabupaten/kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	15 %	100 %	100 %	100 %	100 %	12,044,400	12,044,400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase ARG di Kota Dumai	15 %	13,851,060	
2	08 02 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Persentase ARG di Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah dan kewenangan kabupaten/kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	15 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20,956,700	20,956,700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase ARG di Kota Dumai	15 %	24,100,205	

Kode	Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Catatan Penting	Target Capaian Kinerja				
		Capaian Program	Kecharan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program Sebelum	Sesudah	Kecharan Sub Kegiatan Sebelum	Sesudah	Hasil Kegiatan Sebelum	Sesudah		Sumber Dana	Tolok Ukur	Target		
2080202	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota																115,948,520
208022.0201	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase ARG di Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota kemasyarakatan	Tersedianya dokumen pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	15 %	1	1	1	1	1	1	1	1	1	111,851,990
208022.0202	Advokasi Kebijakan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase ARG di Kota Dumai	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Tersedianya dokumen pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	15 %	12	0	12	0	1	1	1	1	1	4,096,530
208022.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																180,317,885
208022.0302	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG di Kota Dumai	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	15 %	0	0	0	0	1	1	1	1	1	13,020,645

Kode	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Kehadiran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program Selesai		Kehadiran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Pagu Indikatif (Rp.)		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
2.08.02.03	Pengembangan Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG di Kota Dumai	Jumlah Dokumen Komunikasi dan Edukasi (KIE) penyediaan layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	15 %	3 Dokumen	1 Dokumen	1 kegiatan	1 kegiatan	80,000,000	80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		15 %	117,297,240		
2.08.03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>									25,000,000	185,546,000				272,533,700		
2.08.03.2.01	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>									0	67,908,000				22,000,000		
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan/kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	30 %	3 Dokumen	3 Dokumen	7 kecamatan	7 kecamatan	0	67,908,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	30 %	2,000,000	
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	30 %	7 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	7 kecamatan	7 kecamatan	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	30 %	20,000,000	
2.08.03.2.02	<b>Peayediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>									0	92,538,000				141,533,700		

		Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Sebelum	Sesudah
2	08 2.02 01	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan korban Kekerasan Kabupatèn/Kota yang mendapatkan Layanan Pengaduan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupatèn/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 %	30 Orang	0 Orang	1 UPT PPA	1 UPT PPA	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	30 %	35,000,000
2	08 2.02 02	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan korban Kekerasan Kabupatèn/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupatèn/Kota	Tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 %	25 Layanan	0	1 UPT PPA	1 UPT PPA	0	92,638,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	30 %	106,533,700
2	08 2.03	<b>Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan</b>	<b>Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>30 %</b>	<b>30 %</b>	<b>25 Orang</b>	<b>0 Orang</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>0</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>Meningkatnya perlindungan bagi perempuan</b>	<b>30 %</b>	<b>109,000,000</b>
2	08 2.03 02	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan korban Kekerasan Kabupatèn/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupatèn/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 %	25 Orang	0 Orang	12 bulan	12 bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	30 %	20,000,000

Rencana Tahun 2023													Praktiraan Maju Rencana Tahun 2024			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
		Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	50 Orang	0 Orang	12 bulan	12 bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	30 %	69,000,000
2 08 03 2.03 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 bulan	12 bulan	25,000,000	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	30 %	20,000,000
2 08 04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>															
2 08 04 2.01	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>															
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas keluarga di kota dumai	Jumlah laporan pengembangan kegiatan untuk peningkatan kualitas keluarga kabupaten/kota	Terlaksananya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 laporan	1 laporan	7 kecamatan	7 kecamatan	5,999,300	5,999,300	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya kualitas keluarga di kota dumai	80 %	15,175,480
2 08 05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>															
2 08 05 2.01	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>															
											24,999,980	40,524,980				188,627,088
											24,999,980	40,524,980				188,627,088

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Kelebihan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Kehadiran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemanfaatan data terpelih gender dan anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/kota yang Tersedia	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data terpelih gender dan anak dalam kelembagaan data di kota dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 %	35 %	3	6	4	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Meningkatnya pemanfaatan data terpelih gender dan anak	35 %	107,414,945
2 08 05 2.01 02	Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemanfaatan data terpelih gender dan anak	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data terpelih gender dan anak dalam kelembagaan data di kota dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 %	35 %	3	6	4	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Meningkatnya pemanfaatan data terpelih gender dan anak	35 %	81,212,143
2 08 06	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>														
2 08 06 2.01	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>														
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dunia Usaha	Meningkatnya capaian kota layak anak	Jumlah organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	Tersedianya Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha yang berperan dalam Pemenuhan Hak Anak	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	92	92	4	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Meningkatnya capaian kota layak anak	75 %	57,131,425
															<b>411.860,785</b>
															<b>117,131,425</b>



Kode	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Target Capaian Kinerja		Catatan Penting	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya capaian kota layak anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha yang berperan dalam Pemenuhan Hak Anak	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Kelurahan	75 %	75 %	2 Dokumen	0 Dokumen	92 Lembaga	4 Organisasi	Meningkatnya a capaian kota layak anak	75 %	60,000,000
2.02.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													294,729,360
2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya capaian kota layak anak	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Kelurahan	75 %	75 %	50 Orang	50 Orang	3 kegiatan	3 kegiatan	Meningkatnya a capaian kota layak anak	75 %	69,000,000
2.02.03	Pengembangan Komunikasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya capaian kota layak anak	Jumlah Dokumen Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Kelurahan	75 %	75 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 kegiatan	3 kegiatan	Meningkatnya a capaian kota layak anak	75 %	225,729,360

Kode	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
2 08 06 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya a capaian kota layak anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penguatan dan pengembangan pelayanan penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Kelurahan	75 %	75 %	2	2	2	3	12,547,200	12,547,200	Meningkatnya a capaian kota layak anak	75 %	0
2 08 07	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>					<b>29,999,580</b>	<b>467,453,580</b>					<b>29,999,580</b>	<b>467,453,580</b>			<b>294,830,800</b>
2 08 07 2.01	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>0</b>	<b>81,592,000</b>					<b>0</b>	<b>81,592,000</b>			<b>93,830,800</b>
2 08 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya a perlindungan khusus anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/ kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	50 %	3	3	3	3	0	81,592,000	Meningkatnya a perlindungan khusus anak	50 %	93,830,800
2 08 07 2.02	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>29,999,580</b>	<b>284,201,580</b>					<b>29,999,580</b>	<b>284,201,580</b>			<b>136,000,000</b>
2 08 07 2.02 01	Penyediaan Layanan	Meningkatnya a perlindungan khusus anak	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan kabupaten/ kota	Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Kelurahan	50 %	50 %	50 orang	50 orang	7	7	29,999,580	29,999,580	Meningkatnya a perlindungan khusus anak	50 %	46,000,000
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya a perlindungan khusus anak	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Kelurahan	50 %	50 %	7 Layanan	7 Layanan	7	7	0	254,202,000	Meningkatnya a perlindungan khusus anak	50 %	15,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Target Capaian Kinerja				Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
2.02.07.08	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	1 Dokumen	0 Dokumen	7 layanan	7 layanan	0	0	Meningkatnya a perlindungan khusus anak	50 %	30,000,000	
2.02.07.08	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	1 Dokumen	0 Dokumen	7 layanan	7 layanan	0	0	Meningkatnya a perlindungan khusus anak	50 %	45,000,000	
2.08.07.02	Pengembangan dan Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	2 Dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0	101,660,000	Meningkatnya a perlindungan khusus anak	50 %	65,000,000	
<b>TOTAL</b>											<b>5,845,083,194</b>	<b>7,666,892,538</b>	<b>0</b>	<b>101,660,000</b>	<b>65,000,000</b>	<b>8,748,834,990</b>

Dumai, 10 Agustus 2023  
 KIPPALA  
 MASYHATUN NISWATI  
 MASYHATUN NISWATI, ASNA, SKM, M.Si  
 NIP. 19680529 198903 2 002

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN**

Pelaksanaan program kegiatan tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dengan total anggaran sebesar Rp. 6.845.750.794,- telah terealisasi sebesar Rp. 3.436.321.281,- atau 50.20 % yang terdiri dari :

- a. Program Non Urusan meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan realisasi 54.41%
- b. Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan realisasi 26.03%, yang terdiri dari :
  1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan realisasi 19.41%
  2. Program Perlindungan Perempuan dengan realisasi 17.82%
  3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan realisasi 0.00%
  4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan realisasi 58.57%
  5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan realisasi 41.52%
  6. Program Perlindungan Khusus Anak dengan realisasi 29.33%

Melihat capaian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan program urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2023 belum mencapai target (26.03%) atau dengan kata lain dari 6 program urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hanya satu program yang telah mencapai target sebesar 58.57%.

Beberapa alasan yang dapat dikemukakan sebagai akibat tidak tercapainya target di atas antara lain :

- Pelaksanaan kegiatan pada beberapa sub kegiatan telah dijadwalkan pada Triwulan IV menyesuaikan dengan pelaksanaan acara ditingkat provinsi dan penyelenggaraan HUT kelembagaan yang bertepatan pada akhir tahun.
- Beberapa pagu anggaran diprioritaskan terlebih dahulu untuk manajemen kasus seperti program perlindungan perempuan dan khusus anak
- Anggaran yang telah terealisasi pada Triwulan II sesuai dengan jumlah kasus yang ada.

- Ada beberapa sub kegiatan yang penggunaan anggarannya dialihkan ke APBD Perubahan
- Kegiatan sudah dilaksanakan pada semester satu namun realisasi keuangan belum terakomodir

Dari beberapa factor tersebut maka menjadi pengaruh pada capaian beberapa program tersebut.

## **5.2 KAJIDAH-KAJIDAH PELAKSANAAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT.**

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Menjaga sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di RPJMD dan Renstra DPPPA Kota Dumai.
2. Sebagai pedoman dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah
3. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, DPPPA Kota Dumai berkewajiban untuk melaksanakan program program Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD) Tahun 2023 ini dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.

## **5.3. RENCANA TINDAK LANJUT.**

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana kerja tahun 2023, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen rincian belanja sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.